

**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU
SUMATERA BARAT DALAM MENGADVOKASI SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA TIGA MENTERI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
SERAGAM DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh :
MUHAMMAD RAZIV NUGRAHA
1810833009

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung karena bertentangan adat dan budaya Minangkabau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses advokasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan konsep Perpetimasang mengenai proses-proses advokasi yaitu proses legislasi dan yurisdiksi, proses politik dan birokrasi dan proses sosialisasi dan mobilisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah adalah proses advokasi yang dilakukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yaitu proses legislasi dan yurisdiksi yang menghasilkan pembuatan *judicial review*, proses politik dan birokrasi yang disampaikan Guspardy Gaus, dan proses sosialisasi dan mobilisasi yang membuka rangkaian diskusi dengan organisasi masyarakat dan juga kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang yang paling tinggi.

Kata Kunci : Peran, Advokasi, Kebijakan



ABSTRACT

Joint Decree The Joint Decree of the three Ministers regarding the use of uniforms and attributes in the school environment was sued by the Minangkabau Nature Density Institute of West Sumatra to the Supreme Court because it contradicts Minangkabau customs and culture. The purpose of this study is to explain and analyze the advocacy process of the Minangkabau Natural Density Institute of West Sumatra in suing the Joint Decree of the three Ministers regarding the use of uniforms and attributes in the school environment. The researcher uses Topatimasang's concept of advocacy processes, namely, legislation and jurisdiction processes, political and bureaucratic processes, and socialization and mobilization processes. The method used in this research is qualitative with case studies. The results showed that the cancellation of the Joint Decree of the three Ministers regarding the use of uniforms and attributes in the school environment was an advocacy process carried out by the Natural Minangkabau Density Institute, West Sumatra, namely the legislative and jurisdictional processes that resulted in the making of judicial reviews, political and bureaucratic processes, which were conveyed by Guspari Gaus, and the process of socialization and mobilization that opened a series of discussions with community organizations and also that the policy violated the highest laws.

Keywords: Role, Advocacy, Policy.

